

BAB I

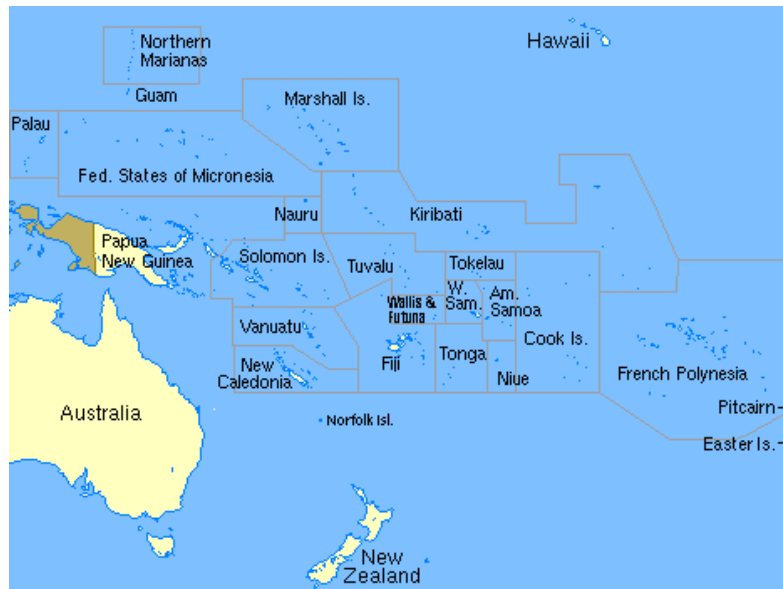
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Tesis ini membahas mengenai kebijakan luar negeri Tiongkok di bawah Pemerintahan Xi Jinping di Pasifik Selatan. Secara spesifik penelitian ini berfokus terhadap adanya peningkatan relasi Tiongkok dengan negara-negara Kepulauan Pasifik (Pacific Island Countries/PICs). Diskursus mengenai kebijakan luar negeri mengembangkan eksistensi hubungan diplomatiknya terhadap kawasan tertentu dalam penelitian ini digolongkan pada ranah kajian perdamaian dan keamanan internasional. Penelitian ini merupakan bagian dari diskursus tersebut dengan melihat pada aspek dinamika politik internasional serta situasi keamanan kawasan sebagai faktor pendorong di balik implementasi kebijakan luar negeri Tiongkok terhadap Pasifik Selatan sebagai salah satu kawasan strategis global.

Pasifik Selatan kerap diabaikan sebagai bagian dari keseluruhan Regional Pasifik. Secara umum Pasifik Selatan terdiri dari ribuan kepulauan kecil yang sebelumnya merupakan bagian dari wilayah jajahan Negara-negara Barat. Proses dekolonisasi kemudian membagi Kepulauan Pasifik Selatan menjadi belasan negara berdaulat dan *freely associated states* (FAS) yang tergabung dalam Pacific Island Forum (PIF). Negara-negara Pasifik Selatan (PICs) meliputi Papua Nugini, Fiji, Vanuatu, Cook Islands, Federasi Mikronesia, Kiribati, Nauru, Niue, Palau, Kepulauan Marshal, Solomon, Samoa, Tonga, Tuvalu, Prancis Polynesia, New Caledonia, Tokelau, Wallis-Futuna serta termasuk dua negara besar regional Australia dan New Zealand (Departement of Foreign Affairs and Trade of Australia, n.d). Walaupun telah memperoleh kemerdekaan secara penuh, hingga saat ini eksistensi PICs masih bergantung terhadap bantuan dari Negara-negara Barat terutama Australia dan New Zealand sebagai dua kekuatan regional terbesar.

Gambar 1.1
Peta Kepulauan Pasifik Selatan



Sumber : Pacific Island Legal Information Institute, n.d. Map of The Island of Pacific Ocean

Di tengah menurunnya perhatian Amerika Serikat dan Eropa pasca Perang Dingin, Tiongkok mulai membangun eksistensinya di Pasifik Selatan. Di bawah Presiden Hu Jintao, Pasifik Selatan telah menjadi bagian dari kebijakan luar negerinya terutama dalam aspek ekonomi. Salah satu momentum penting hubungan Tiongkok-Pasifik Selatan terjadi pada tahun 2006 ketika Premier Wen Jiabao melakukan kunjungan diplomatik ke Fiji guna menginisiasi program China-Pacific Island Countries Economic Development Cooperation Ministerial Conference. Kesepakatan tersebut menandai komitmen keterlibatan Tiongkok yang lebih besar dalam pembangunan kawasan (Harris, 2009). Melalui kerjasama ekonomi dan alokasi bantuan luar negeri, Tiongkok menjadi negara dengan jumlah relasi diplomatik terbesar di kawasan meliputi tujuh dari tiga belas PICs. Tercatat pada tahun 2010, Tiongkok mengalirkan bantuan luar negeri dan investasi mencapai 115 juta USD, menjadikannya sebagai salah satu donatur terbesar di kawasan. Sementara itu hingga tahun 2009 perdagangan Tiongkok dengan PICs mencatatkan nilai 1,4 milyar USD (IMF, 2009). Selain dalam sektor ekonomi, relasi Tiongkok dan PICs pada periode mulai menapaki kooperasi pada aspek pertahanan dan keamanan (Shie, 2007).

Gambar 1.2
Peta Letak Geografis Cinta terhadap Kepulauan Pasifik Selatan



Sumber : Hille, Kathrine, 2019. Pacific Islands : New Arena of Rivalry Between China and US

Pada era Pemerintahan Xi Jinping relasi Tiongkok dengan PICs telah mengarah pada bentuk kerjasama komperhensif dan strategis. Menurut laporan US-China Economic and Security Review Comission (2018) hubungan ekonomi Tiongkok dan PICs mengalami peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir. Pemerintahan Xi Jinping mentransformasikan Tiongkok sebagai salah satu aktor sentral di kawasan dengan nilai perdagangan, investasi, bantuan pembangunan hingga sektor pariwisata yang tinggi terhadap negara-negara partnernya di kawasan. Sementara itu di bawah Xi, Tiongkok mulai memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan dengan Papua Nugini dan Fiji yang merupakan *secondary regional power* di kawasan. Hal ini berpotensi mengalami perluasan seiring dengan adanya keterlibatan negara seperti Vanuatu dan Tonga dalam skema kerjasama militer People Liberation Army (PLA) di Pasifik Selatan (Conolly, 2016).

Penguatan kehadiran Tiongkok di Pasifik Selatan terlihat dari kenaikan intensitas kegiatan diplomatik beserta kesepakatan yang dihasilkan. Salah satu *turning point* terjadi pada tahun 2014 saat Xi Jinping melakukan kunjungan ke Fiji sebagai kunjungan kenegaraan pertama pemimpin

tertinggi Tiongkok di Kepulauan Pasifik Selatan dan diikuti oleh seluruh PICs “aliansi” Beijing. Berselang empat tahun kemudian, pada tahun 2018, Xi kembali melakukan kunjungan kenegaraan ke Pasifik Selatan bersamaan dengan penyelenggaraan Forum APEC di Papua Nugini. Dalam pertemuan keduanya dengan para pemimpin PICs, Xi Jinping (dalam Reuters, 2018) mengungkapkan bahwa Tiongkok berada dipihak negara-negara berkembang dalam upaya mewujudkan kemakmuran, keterbukaan, dan relasi bersama. Inisiatif Tiongkok menuai respon positif dikalangan PICs. Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O’Neill menyatakan dukungan Pemerintah Papua Nugini terhadap langkah kebijakan Tiongkok baik yang ditujukan bagi negaranya maupun pengembangan PICs lainnya. Peningkatan perhatian Pemerintahan Xi Jinping semakin terlihat dengan adanya kunjungan balasan dari beberapa pemimpin PICs sepanjang tahun 2018 hingga 2020. Salah satunya kunjungan balasan Papua Nugini berkaitan dengan pembahasan lebih lanjut mengenai hubungan partner strategis mengacu pada posisi Papua Nugini sebagai negara dominan di Pasifik Selatan. Selain itu dalam kunjungan balasan Perdana Menteri Vanuatu di tahun yang sama, kedua pemerintahan menegaskan komitmen atas relasi strategis Tiongkok-Vanuatu (SCMP, 2019).

Agresivitas diplomasi Xi Jinping di Pasifik Selatan menghasilkan hubungan Tiongkok-PICs yang semakin signifikan. Pada kunjungan diplomatik pertamanya, Xi Jinping mengumumkan transformasi kerjasama Tiongkok dari *friendly and cooperative relation* kearah *strategic partnership* dengan PICs. Sementara dalam kunjungan keduanya pada tahun 2018 di Papua Nugini, Pemimpin Tiongkok dan PICs berkomitmen meningkatkan relasi diplomatik dalam wujud *comprehensive strategic partnership*. Dikutip dalam berita Xinhua (2018) tahapan relasi ini setidaknya mengandung empat prinsip meliputi, peningkatan kepercayaan antar negara, pengembangan kerjasama mutual, pengembangan persahabatan pada tingkat pemerintah dan relasi *people to people*, dan terakhir adalah upaya peningkatan keamanan dan keadilan di Pasifik Selatan.

Prinsip dasar penguatan relasi Tiongkok-Pasifik Selatan lebih lanjut dikembangkan melalui keterlibatan PICs dalam kerangka kerjasama Belt and Road Initiative (BRI). Kesepakatan BRI Pasifik Selatan berhasil tercapai dalam pertemuan kedua Xi Jinping dengan para pemimpin PICs tahun 2018. Penerapan BRI merupakan wujud komitmen Pemerintahan Xi membantu pengembangan dan pembangunan kawasan melalui peningkatan alokasi investasi dan bantuan luar negeri dari Tiongkok bagi PICs. Begitu pula sebaliknya, dikutip dari Kementerian Luar Negeri

Tiongkok (2018) delapan pemimpin PICs mengapresiasi inisiatif BRI Tiongkok di kawasan. Salah satunya Perdana Menteri Federasi Mikronesia, Peter Christian menyampaikan bahwa perhatian Tiongkok penting bagi kemajuan PICs terutama sektor perdagangan dan pariwisata serta mengatasi ancaman perubahan iklim. Penerapan BRI kembali mengalami perluasan di Pasifik Selatan pada akhir tahun 2019 dengan bergabungnya Kepulauan Solomon dan Kiribati. Dengan bergabungnya PICs, BRI kini melibatkan lebih dari 130 negara di berbagai kawasan. Hal ini sekaligus membuktikan posisi Tiongkok yang semakin penting di kawasan (Rajah et al, 2019).

Kebijakan Xi Jinping di Pasifik Selatan menghadirkan konsekuensi positif bagi upaya Tiongkok mencapai *core interest*-nya. Sejalan dengan keberhasilan peningkatan kerjasama, sebagian besar PICs telah berkomitmen pada prinsip *One China Policy*. Bahkan kekuatan diplomatik Tiongkok kembali bertambah dengan kembalinya pengakuan diplomatik dari Kiribati dan Kepulauan Solomon (CGTN, 2020). Diplomasi intensif Tiongkok di kawasan juga mampu mengakibatkan beberapa negara seperti Vanuatu, Papua Nugini, dan Fiji mendukung klaim Tiongkok atas Laut Cina Selatan di tengah penolakan dari kalangan internasional (Zhang, 2017). Pada kunjungannya ke Tiongkok pada tahun 2016, Perdana Menteri Papua Nugini menyampaikan bahwa pihaknya menghormati langkah Tiongkok di Laut Cina Selatan (LCS). Begitu pula Perdana Menteri Vanuatu menyatakan dukungannya bagi Tiongkok untuk dapat menyelesaikan permasalahan LCS secara damai dan independen bersama negara pengklaim lainnya (Pacific Island Report, 2016).

Menguatnya kehadiran Tiongkok di Pasifik Selatan pada masa Xi Jinping semakin memperlihatkan anomali mengingat secara geografis wilayah ini terletak diluar dominasi penguasaan Tiongkok terhadap wilayah di sekitaran Laut Cina Timur dan Selatan. Selain itu peningkatan kehadiran Tiongkok juga bertentangan dengan realitas Pasifik Selatan sebagai bagian dari *sphere of influence* Negara-negara Barat sejak era Perang Dunia Kedua dan Perang Dingin. Maka dari itu kebijakan luar negeri agresif Tiongkok di Pasifik Selatan menjadi objek pembahasan menarik dalam kajian Hubungan Internasional dalam konteks situasi politik dan keamanan internasional era kontemporer. Penelitian ini mengkaji arti penting Pasifik Selatan dalam kebijakan luar negeri Tiongkok era Xi Jinping.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang muncul adalah “Bagaimana arti penting Pasifik Selatan dalam kebijakan luar negeri Tiongkok Era Pemerintahan Xi Jinping ?”

I.3 Tinjauan Literatur

Berkaitan dengan rumusan masalah yang diajukan, penelitian ini berdasarkan pada beberapa literatur sebelumnya. Peneliti membagi literatur ke dalam tiga kategori meliputi aspek ekonomi, pertahanan dan keamanan serta kemaritiman. Pertama, beberapa literatur sebelumnya berasumsi bahwa arti penting Pasifik Selatan bagi Tiongkok hanya terbatas pada aspek ekonomi. Kedua, beberapa literatur oleh penstudi lainnya melihat bahwa pendekatan Tiongkok di Pasifik Selatan sejauh ini di latar belakang oleh arti penting kawasan tersebut bagi aspek politik dan keamanan Tiongkok di era kontemporer. Sementara itu pada ketogeri ketiga, sebagian kecil penstudi yang mengkaitkan potensi maritim strategis Pasifik Selatan dengan agresivitas kehadiran Tiongkok di kawasan ini. Bahwa Pasifik Selatan merupakan kawasan yang tidak dapat diabaikan dalam menunjang proyeksi kekuatan maritim global Tiongkok yang komperhensif mencakup ranah ekonomi dan pertahanan-keamanan.

Pemahaman bahwa arti penting Pasifik Selatan bagi Tiongkok terbatas pada ranah ekonomi salah satunya diungkapkan oleh Hayward-Jones (2013). Meningkatnya aktivitas Tiongkok di kawasan tidak berhubungan dengan perseteruan negara besar layaknya Perang Dingin. Sejauh ini kerjasama yang dibangun oleh Tiongkok hanya memiliki latar belakang ekonomi berkaitan melalui peningkatan bantuan luar negeri dan perdagangan terhadap negara-negara kawasan Pasifik Selatan. Lebih lanjut menurut Hayward-Jones (2013) hal ini terefleksikan dari keengganan petinggi Tiongkok mengungkapkan posisi kawasan ini sebagai fokus strategis kebijakan luar negerinya. Sejalan dengan pandangan tersebut, Wesley-Smith (2013) memahami pendekatan Tiongkok terhadap PICs tidak dapat dikaitkan dengan isu spesifik tentang kompetisi strategisnya dengan Amerika Serikat, kepentingan penguasaan sumber daya energi, maupun mengenai persaingan *check-book diplomacy* terhadap Taiwan. Saat ini pendekatan Tiongkok di Pasifik Selatan hanya sebatas penguatan kerjasama antar negara-negara berkembang dalam skala yang lebih besar. Inisiatif serupa juga dilakukan Tiongkok terhadap negara-negara berkembang lainnya di kawasan Afrika, Asia, Amerika Latin, dan Timur Tengah.

Wesley-Smith dan Porter (2010) juga mengungkapkan ketidakyakinannya bahwa Tiongkok memiliki kepentingan strategis di Pasifik Selatan. Langkah Tiongkok ini hanya merupakan bagian dari upayanya memperoleh keuntungan ekonomi terutama terhadap sumber daya alam seperti halnya ekspansi yang dilakukan terhadap wilayah lainnya. Dengan mendekatkan diri terhadap

PICs, Tiongkok berusaha meningkatkan keuntungan dari sektor perdagangan dan bantuan luar negeri yang selama ini terbilang sangat minim di Pasifik Selatan yang hanya berkisar 0,12% dari keseluruhan perdagangan dan hanya 4,2% dari total jumlah bantuan yang dikeluarkan. Alasan serupa juga diungkapkan oleh Yongjin Zhang (2007) bahwa Tiongkok memiliki kepentingan strategis terbatas sejalan dengan relasi diplomasi serta investasi yang minim dibandingkan negara kekuatan besar lain di Regional Pasifik Selatan. Maka dari itu pendekatan Tiongkok terhadap PICs tidak ditujukan untuk mengisi kekosongan kekuatan global atau menggantikan posisi Amerika Serikat dan Eropa.

Pemahaman tersebut berbeda dengan literatur yang lebih fokus pada aspek politik dan keamanan. Menurut Relly dan Henderson (2003) Pasifik Selatan merupakan kawasan penting dalam mewujudkan reunifikasi Tiongkok dengan Taiwan. Hal ini juga berhubungan dengan aspek pertahanan dari kekuatan Amerika Serikat dalam jangka panjang. Begitu pula Pankaj Jha (2019) mengungkapkan Pasifik Selatan penting bagi Tiongkok untuk mengimbangi eksistensi diplomasi Taiwan di Pasifik Selatan. Aspek kedua, sebagai langkah *engagement* terhadap negara-negara kekuatan kecil dan menengah guna mempertahankan dukungan politik sebagai *great power*. Anggapan tersebut serupa dengan Thomas Lum dan Vaughn (2007) menyatakan dorongan utama kehadiran Tiongkok di Pasifik Selatan adalah mengamankan dominasi kekuatan diplomatiknya atas Taiwan, memperoleh keuntungan dari melemahnya posisi Amerika Serikat, dan mengatasi permasalahan mengenai keberadaan imigran bisnis Tiongkok di beberapa negara PICs. Selaras dengan pandangan ini, Jian Yang (2011) mengungkapkan bahwa Kepulauan Pasifik Selatan merupakan bagian penting dari *grand strategy* Tiongkok. Dalam jangka panjang kebijakan ini bertujuan dapat menyaingi dominasi Amerika Serikat dan sekutunya. Sementara dalam jangka pendek, pendekatan Tiongkok ke Pasifik Selatan sebagai bagian dari kepentingan keamanan nasional Tiongkok yaitu mendegradasi kekuatan diplomatik Taiwan (Yang, 2011).

Tulisan selanjutnya oleh Tamara Shie (2007) melihat bahwa sejak awal kehadiran Tiongkok di Pasifik Selatan penting untuk mengisolasi kekuatan diplomatik Taiwan. Hal ini dikarenakan sebagian besar pengakuan terhadap kedaulatan Taiwan berasal dari negara-negara PICs. Pasifik Selatan juga menyimpan potensi sumber daya alam yang menjadikan kawasan ini sebagai wilayah strategis bagi Tiongkok. Sementara itu Saunders (2010) juga berpandangan kawasan Pasifik Selatan penting bagi Tiongkok dikarenakan sebagian besar dukungan terhadap Taiwan berasal dari

kawasan ini telah mendorong Pemerintah Tiongkok untuk terus meningkatkan fokus kebijakan luar negerinya terhadap di Pasifik Selatan. Selain itu terdapat kepentingan strategis lain dalam konteks geopolitik dan geoekonomi di kawasan seperti upaya ekspansi kekuatan ekonomi dan bisnis serta jaminan pertahanan dan keamanan dalam persaingan politiknya terhadap Amerika Serikat (Saunders, 2010).

Melalui tulisannya, Bertil Lintner (2010) mengungkapkan bahwa kepentingan di balik keinginan Tiongkok mendekati PICs terbilang kompleks. Dalam jangka pendek, kebijakan Tiongkok di Pasifik Selatan bertujuan mengisolasi kekuatan diplomatik Taiwan. Sementara dalam jangka panjang berupaya memberikan tantangan atau bahkan menggantikan kedudukan Negara-negara Barat sebagai protektor bagi Pasifik Selatan. Membahas mengenai kepentingan negara-negara besar di Pasifik Selatan, Baiq Wardhani (2015) menyebutkan bahwa Pasifik Selatan memiliki nilai strategis yang tidak dapat diabaikan oleh negara-negara besar. Bagi Tiongkok setidaknya terdapat tiga kepentingan strategis terhadap Pasifik Selatan, yaitu membendung dominasi pengaruh Amerika Serikat, mencegah perkembangan aspirasi internasional Jepang, dan berupaya semakin mengisolasi kemampuan diplomatik Taiwan. Upaya Tiongkok menjalin hubungan diplomatik serta pembangunan infrastruktur secara masif dapat menjadi pertanda adanya implikasi strategis dari kehadirannya di Pasifik Selatan (Wardhani, 2015).

Membahas lebih lanjut tentang eksistensi Tiongkok di Pasifik Selatan, Zhang (2017) menyampaikan bahwa dewasa ini Tiongkok bersikap semakin ofensif terhadap permasalahan yang menyangkut *core interest*-nya. Penguatan pengaruh Tiongkok di Pasifik Selatan dewasa ini tidak serta merta menghasilkan kesimpulan bahwa wilayah ini merupakan bagian penting dari kepentingan Tiongkok. Akan tetapi *core-interest* Tiongkok sebagaimana yang tertuang dalam White Paper 2011 mengenai upaya mencapai *One China Policy* di seluruh Kawasan Pasifik mendorongnya untuk semakin aktif di wilayah Pasifik Selatan (Zhang, 2017). Kemudian Roger Matthew (2013) mengungkapkan kehadiran Tiongkok di Pasifik Selatan berlandaskan atas tiga faktor utama. Kepentingan utama adalah mengisolasi Taiwan guna mewujudkan misi reunifikasi. Kedua, pengaruh Tiongkok terhadap belasan PICs dapat menunjang status politik dan kepentingan Tiongkok di ranah global. Ketiga terdapat upaya Tiongkok dalam menyaingi dan menggantikan dominasi Amerika Serikat di Pasifik (Matthew, 2013).

Menurut Fergus Hanson (2010) Tiongkok sebenarnya memiliki berbagai dasar kepentingan terhadap kawasan Pasifik Selatan. Wilayah ini merupakan objek strategis yang dapat menjadi jalan bagi Tiongkok mengembangkan penguasaan perdagangannya. Selain itu kawasan ini penting guna semakin mendegradasi legitimasi Taiwan dan mewujudkan reunifikasi Tiongkok. Disamping dua aspek tersebut, kepentingan lain juga mampu didapatkan oleh Tiongkok apabila mampu mengoptimalkan pengembangan pengaruh di kawasan ini, mulai dari aspek militer, keamanan energi, voting internasional, hingga aspek keamanan manusia mengenai perlindungan diaspora masyarakatnya. Sementara tulisan oleh Wallis (2012) menyampaikan bahwa situasi di Pasifik Selatan merefleksikan gambaran besar mengenai persaingan Tiongkok terhadap Amerika Serikat di Asia-Pasifik. Sebagai negara potensi hegemoni global, terdapat ambisi untuk mendominasi kawasan dan memberikan tekanan bagi hegemoni strategis Amerika Serikat dan aliansinya selama ini.

Pada aspek kemaritiman berbagai literatur memaparkan mengenai ambisi Pemerintah Tiongkok mengembangkan ranah kemaritimannya. Literatur oleh David G. Muller (1983) menjelaskan Tiongkok memiliki sejarah panjang kekuatan laut, politik, pemikiran strategis, ekonomi maritim, dan hubungan internasional maritim sejak era kedinastian yang mempengaruhi ambisi perkembangan kekuatan maritim Tiongkok era kontemporer. Sementara itu Yijing Liu (2000) menyampaikan pentingnya Pemerintah Tiongkok dalam merealisasikan konsep *Command of the Sea* sebagai pendukung perkembangan ekonomi, keamanan, dan kepentingan nasional lainnya. Pihaknya berpendapat bahwa elemen dasar bagi perkembangan kemaritiman Tiongkok adalah mengembangkan kekuatan *navy* yang seimbang dengan kekuatan lain untuk memperoleh *Command of the Sea* terutama di wilayah laut strategis yaitu kawasan Pasifik Barat Laut dan Samudera Hindia.

Menurut An-Hao Huang (2009) Tiongkok bukan lagi kekuatan kontinental seiring dengan transformasi dari strategi pasca Perang Dingin dari berbasis pada *landward security* ke arah *seaward security*. Pemahaman tentang kemaritiman ini sebelumnya di era Mao terbilang sangat terbatas dengan menekankan pada aspek *coastal defence*. Sementara di era kontemporer aktivitas maritim Tiongkok fokus pada *offshore defence* bahkan *far seas defence* ditandai dengan fokus militer, ekonomi serta politik meliputi aktivitas trans-regional melalui wilayah laut. Setidaknya pengembangan sektor maritim tersebut dilandasi oleh tiga kepentingan laut menurut Huang (2009)

yaitu, pertama *core interest* yang merupakan upaya menjaga eksistensi serta reunifikasi. Kedua, *decisive maritime interest* merujuk pada upaya mewujudkan stabilitas politik dan ekonomi untuk mendukung kepentingan *core-interest*. Sementara itu kepentingan ketiga, *peripheral maritime interest* mencakup aspek luas mulai dari penyelesaian sengketa laut secara damai, aktivitas humanitarian, hingga pengembangan kerjasama maritim regional.

Sementara itu beberapa literatur juga menyinggung mengenai arti penting Pasifik Selatan bagi aktivitas kemaritiman Tiongkok, walaupun belum disertai dengan pemaparan yang spesifik dan komperhensif. Paco Milhet (2017) mengungkapkan kepentingan maritim Tiongkok di Pasifik Selatan mencakup sumber daya laut hingga penguasaan penuh terhadap Taiwan. Secara bilateralisme, Tiongkok memiliki misi beragam di kawasan berdasarkan sub-regionalnya. Seperti di wilayah Melanesia, keberadaan Tiongkok bertujuan memperoleh kekayaan sumber daya alam dan posisi strategis di negara seperti Papua Nugini dan Fiji. Sementara di Mikronesia penguatan pengaruh Tiongkok kerap dikaitkan dengan dominasi Amerika Serikat melalui basis militernya di Guam (Milhiet, 2017). Begitu juga Chang Sen (2015) memaparkan selain bertujuan dalam meningkatkan posisi politiknya terhadap Amerika Serikat, meningkatkan kekuatan hagemoninnya atas negara-negara lain, serta faktor reunifikasi dengan Taiwan, secara spesifik Pasifik Selatan juga penting dalam mendukung aspek maritim Tiongkok. Wilayah ini dapat menyediakan jalur perdagangan alternatif sekaligus potensi sumber daya dalam menunjang perkembangan kekuatan politik dan ekonomi Tiongkok.

Berkaitan dengan literatur sebelumnya diatas, penelitian ini menekankan pada arti penting kawasan Pasifik Selatan bagi Tiongkok dalam aspek kemaritiman. Preferensi tersebut didasari oleh beberapa alasan. Pertama adalah realita bahwa Pasifik Selatan memiliki potensi strategis sebagai wilayah lautan terluas dan esensial walaupun dengan luas teritorial yang terbatas. Kedua, keberadaan kekuatan United States Pacific Command (PACOM) serta eksistensi Taiwan menjadi *concern* bagi ambisi kemaritiman Tiongkok. Pemaparan literatur sebelumnya mengenai pengembangan kekuatan maritim Tiongkok di atas masih bersifat umum dan tidak secara spesifik berfokus pada aspirasi kekuatan maritim globalnya pada era Pemerintahan Xi Jinping. Di sisi lain literatur tersebut belum memberikan penjelasan secara komperhensif mengenai fungsi dan peran kawasan Pasifik Selatan dalam proyeksi maritim tersebut. Maka dari itu, berbeda dengan berbagai literatur sebelumnya, penelitian ini fokus membahas arti penting Pasifik Selatan bagi perwujudan

ambisi pengembangan kekuatan maritim di era Xi Jinping. Pemerintahan Xi Jinping berusaha mentransformasikan Tiongkok sebagai *maritime power* dalam visi besar *Chinese Dream*. Hal ini dilakukan dengan pengembangan strategi dan kapabilitas maritim secara signifikan dibandingkan berbagai periode pemerintahan sebelumnya (Yoon, 2015). Ambisi kekuatan maritim tersebut menurut Yoon (2015) meliputi, pengakuan Tiongkok sebagai *great power*, melindungi kepentingan maritim Tiongkok melalui pemanfaatan seluruh potensi kelautan yang dimiliki, menyelesaikan permasalahan sengketa laut serta menghindari persepsi bahwa pengembangan maritim Tiongkok adalah ancaman.

I.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang arti penting Pasifik Selatan dalam kebijakan luar negeri Tiongkok era Xi Jinping khususnya pada ranah kemaritiman.

I.5 Kerangka Pemikiran

I.5.1 Power dalam Perspektif Realisme

Power merupakan konsep sentral perspektif realisme dalam memahami hubungan internasional. Definisi *power* menurut Baldwin (2002) mencakup dua pendekatan, pertama *power* dipahami sebagai segala atribut atau *resources* yang dimiliki negara. Di sisi lain terdapat pendekatan relasional yang melihat *power* sebagai kemampuan *behavior* negara dalam mempengaruhi negara lain. Mengacu pada teori realisme klasik Morgenthau (2010) kekuatan nasional negara meliputi berbagai unsur mulai dari geografi, sumber daya alam, kapabilitas industri, kekuatan militer, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi, hingga kapabilitas pemerintahan. Begitu juga penstudi Kenneth Waltz (dalam Baldwin, 2002) memahami konsep *national power* sebagai kapabilitas negara yang diperoleh dari seluruh unit atribut yang dimiliki negara mulai aspek ekonomi, militer, jumlah populasi, luas teritorial, potensi sumber daya, kompetensi pemerintahan, dan stabilitas politik. Berdasarkan perhitungan kapabilitas tersebut, negara kemudian dapat dikategorikan sebagai negara *great power* hingga *small power*.

Pemahaman konsep *power* tidak hanya terbatas elemen atribut yang dimiliki negara. Robert Dahl (dalam Baldwin, 2002) memahami *power* sebagai hubungan aktual diantara dua atau lebih aktor negara ketimbang pemahaman yang terbatas pada elemen atribut yang dimiliki negara. Dahl (dalam Baldwin, 2002) kemudian menggambarkan *power* sebagai kemampuan sebuah negara A mengubah perilaku oleh aktor negara B. Henderson (1998) mendefinisikan bahwa *power*

sebagai kemampuan negara mempengaruhi perilaku negara lain. Hal ini dapat dilakukan baik melalui penggunaan atribut *hard power* maupun *soft power*. Begitu juga Joseph Nye (1990) memahami konsep *power* dalam konteks relasional, bahwa *power* adalah kemampuan negara melakukan tindakan serta melakukan kontrol terhadap negara atau aktor lainnya. Kemampuan kontrol didasari kepemilikan atribut sumber daya seperti jumlah populasi, potensi geografi, kekuatan militer, hingga kekayaan sumber daya alam. Akan tetapi aspek atribut kekuatan *tangible* tersebut tidak lagi dominan dalam pemahaman mengenai konsep *power*. Dewasa ini menurut Nye (1990) dominasi penggunaan instrumen *hard power* seperti kekuatan militer dikalangan negara *great power* mulai terbatas. Untuk mencapai kontrol dan dominasi, proyeksi pengembangan kekuatan militer dibarengi dengan upaya mengedepankan aspek *soft power* yang bersifat *intangible* seperti pengembangan teknologi, diplomasi, edukasi serta pertumbuhan ekonomi.

I.5.2 Kekuatan Maritim dan Arti Penting Wilayah Laut bagi *Great Power*

1.5.2.1 Kekuatan Maritim

Pembahasan mengenai istilah *maritime power*, *naval power*, dan *sea power* berkembang dari pemikiran strategis maritim klasik. Sir Julian Corbett (dalam Heuser, 2010) mendefinisikan kekuatan maritim sebagai kapabilitas tata kelola peperangan yang menekankan laut sebagai unsur substansial. Bagi Corbett, kekuatan maritim bukan perihal kemampuan negara menguasai laut (*command of the sea*), akan tetapi mengenai kekuatan mengontrol jalur komunikasi laut sebagai objek vital baik dalam konteks militer maupun komersial (Heuser, 2010). Praktisi strategis maritim berpengaruh lainnya, Alfred Thayer Mahan (1898), menjelaskan menggunakan istilah *sea power* sebagai kemampuan negara menguasai lautan (*command of the sea*) untuk melindungi kepentingan pertahanan maupun komersial. Hal ini dapat dicapai melalui pembentukan aliansi sekaligus mengembangkan infrastruktur kelautan di wilayah laut strategis sebagai pertahanan sekaligus *shelter* bagi aktivitas perdagangan lautnya. Terdapat lima elemen *sea power* menurut Mahan (1898) yakni, pertama, *geographical position* yaitu tentang letak wilayah teritorial negara terhadap wilayah laut dan samudera. Kedua adalah *physical confirmation* mengenai kondisi fisik dari wilayah laut yang dimiliki. Elemen ketiga adalah *extent of teritory* yakni tentang luas garis pantai, teluk, dan wilayah semenanjung sebagai aset strategis menunjang kekuatan lautnnya. Keempat adalah jumlah populasi terutama di wilayah garis pantai yang dapat dipekerjakan dalam

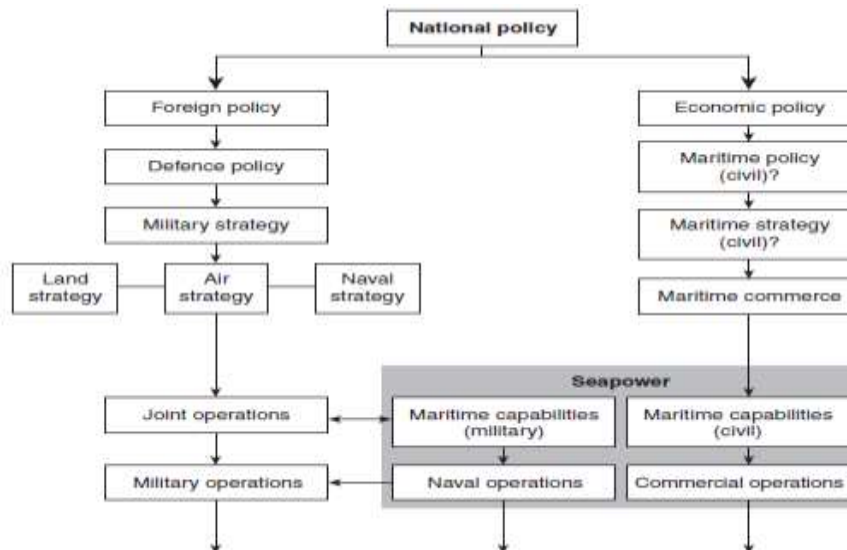
menunjang aktivitas kelautan. Elemen *sea-power* terakhir adalah *national character* yakni mengenai pandangan dan kemampuan negara terhadap arti penting wilayah laut (Mahan, 1898).

Berdasarkan pemahaman kemaritiman Corbett, John Hattendorff (dalam Heuser, 2010) mendefinisikan kekuatan maritim sebagai kemampuan eksploitasi sumber daya laut, keamanan arus perdagangan hingga kemampuan diplomasi serta partisipasi dalam ranah internasional mengenai tata kelola kelautan. Ide kemaritiman Mahan berpengaruh signifikan bagi pemahaman *sea power* di kalangan strategis Amerika Serikat era Perang Dunia Kedua. E.B Potter dan Chester Nimitz mengungkapkan *sea power* adalah kapasitas negara menggunakan laut atas dasar karakter dan jumlah populasi, pemerintahan, kekuatan ekonomi, kualitas infrastruktur kelautan, panjang garis pantai, dan letak geografi hingga jumlah koloni. Negara dengan kekuatan laut dominan memiliki kapasitas tersebut untuk menguasai dan mengontrol lautan bila perlu melalui jalan perang (Gompert, 2013). *Sea power* adalah produk ekonomi, politik, teknologi dan geografi. Dari sisi ekonomi, terdapat kebutuhan mengamankan jalur komunikasi perdagangan. Pada sisi politik, terdapat kebutuhan negara untuk menjamin keamanan dan pertahanan laut. Sementara itu teknologi berhubungan dengan kapabilitas fisik negara termasuk kemampuannya dalam mengeksplorasi potensi laut. Terakhir adalah geografi sebagai keadaan paling dasar bagi proyeksi kekuatan laut sebuah negara. Konsep *sea power* merupakan kombinasi empat faktor tersebut dalam situasi kompetisi dan konflik kepentingan nasional di wilayah laut (Gompert, 2013).

Signifikansi peran laut di era globalisasi mengakibatkan pemahaman tentang kekuatan maritim tidak lagi hanya mengacu pada pemikiran strategis klasik. Dengan menggunakan istilah *seapower*, Geoffrey Till (2009) memaparkan bahwa pada sisi *input*, *seapower* terdiri dari unsur pertahanan militer seperti armada laut dan industri maritim serta berbagai elemen darat yang berkontribusi dalam aktivitas kelautan. Sementara itu dari sisi *output*, *seapower* adalah kapasitas mempengaruhi aktor lain serta mengelola tindakan yang berkaitan dengan kondisi di laut. Dapat dilihat pada Bagan 1.1, Till (2009) memaparkan dua konklusi mengenai konsep *seapower* yakni, pertama *seapower* tidak hanya mengenai jumlah total infrastruktur kelautan yang dimiliki negara. Akan tetapi konsep ini mencakup segala kontribusi yang dapat dilakukan elemen kekuatan laut menunjang pertahanan dan keamanan wilayah teritorial negara baik di laut, darat, maupun udara. Sementara dalam konteks non-militer, kemampuan tata kelola aktivitas komersial seperti jalur perdagangan, industri kelautan, dan eksploitasi sumber daya laut juga merupakan bagian dari

konsep *seapower*. Kedua, *sea-power* perlu dipahami sebagai hal relatif yang mana setiap negara memiliki fokus dan derajat kekuatannya masing-masing. Di satu sisi terdapat negara yang memfokuskan *seapower* yang pada sektor industri dan komersial, sementara juga terdapat negara dengan derajat *seapower* yang lebih dominan pada sektor angkatan lautnya. Bahkan beberapa negara kekuatan besar menghasilkan dominasi *seapower* melalui kombinasi antar keduanya.

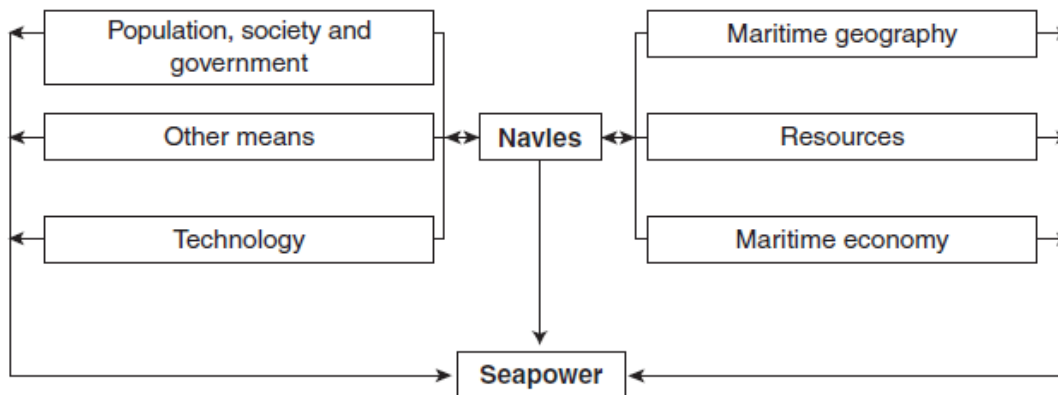
Bagan 1.1
Letak Seapower dalam National Policy



Sumber : Till, Geoffrey, 2009. *Seapower : A Guide for the Twenty First Century*

Melalui Bagan 1.2 Geoffrey Till (2009) menjelaskan elemen *seapower* negara ditentukan oleh banyak konstituen berpengaruh mulai dari komunitas kemaritiman meliputi jumlah populasi, kondisi sosial, dan sistem pemerintahan. Elemen konstituen lainnya adalah kondisi geografis, sumber daya laut, dan kapabilitas ekonomi kemaritiman yang mencerminkan keunikan serta keunggulan *seapower* secara relatif. Selain itu kemampuan pengembangan teknologi militer dan ekonomi maritim masih merupakan bagian dari *seapower* negara. Elemen konstituen terakhir adalah segala sumber *seapower* yang berasal dari berbagai unsur *landpower* dan *airpower* yang berpengaruh terhadap kepentingan negara di wilayah laut (Till, 2009).

Bagan 1.2
Elemen Konstituen dalam Sea Power



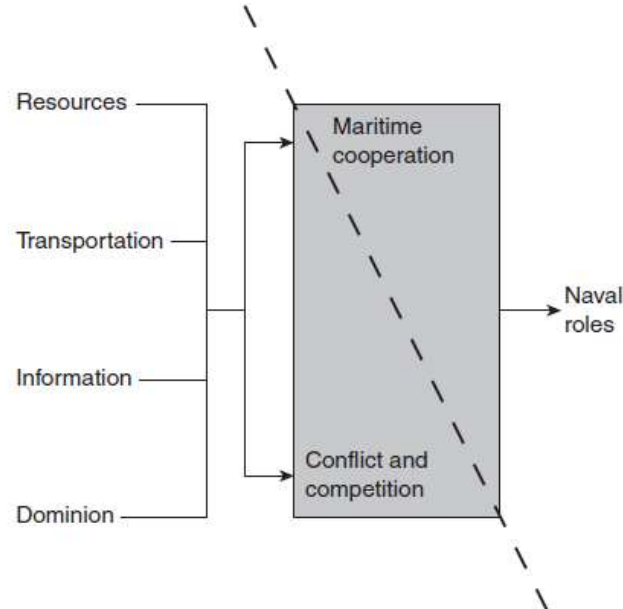
Sumber : Till, Geoffrey, 2009. Seapower : A Guide for the Twenty First Century

I.5.2.2 Arti Penting Wilayah Laut bagi *Great Power*

Perkembangan globalisasi berimplikasi pada signifikansi peran wilayah laut yang kian kompleks dari sekadar kebutuhan perang dan jalur komunikasi laut. Menurut Geoffrey Till (2009) terdapat setidaknya empat arti esensial laut di era globalisasi yakni, pertama sebagai sumber daya seperti energi minyak, gas alam, dan mineral untuk menunjang aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Arti penting selanjutnya adalah sebagai media transportasi serta pertukaran ide dan informasi. Fungsi laut yang keempat adalah sebagai media strategis mencapai dominasi terhadap negara lainnya. Hal ini dapat dilihat dari penguasaan laut sebagai faktor di balik dominasi internasional sejak masa Yunani Kuno hingga hegemoni Amerika Serikat (Till, 2009).

Setiap negara memiliki beragam ambisi dan motivasi terhadap area laut. Dengan melakukan kontrol terhadap area laut strategis, masing-masing negara berupaya memaksimalkan perolehan potensi laut untuk menunjang eksistensinya. Maka dari itu, Bagan 1.3 memberikan pemahaman bahwa laut menjadi salah satu faktor pembentuk relasi antar negara dalam hubungan internasional. Empat arti penting laut tersebut saling berkaitan dan setiap elemennya dapat melahirkan tendensi negara untuk berkompetisi atau membangun kooperasi dalam mencapai kepentingan maritimnya (Till, 2009).

Bagan 1.3
Respon terhadap Empat Atribut Laut



Sumber : Till, Geoffrey, 2009. Seapower : A Guide for the Twenty First Century

Pemikiran maritim strategis Alfred Thayer Mahan (1898) menyediakan landasan pemahaman tentang relasi antara potensi laut dan dominasi *great power*. Penguasaan laut selalu menjadi kunci bagi dominasi *great power*. Dalam sudut pandang sosial dan politik, peran utama laut adalah sebagai *great highway* bagi kepentingan lalu lintas perdagangan negara-negara besar. Mahan (1898) mencontohkan bahwa hegemoni Inggris dan Belanda terdahulu dibangun atas kemampuannya memproyeksikan kekuatan laut dalam melindungi kepentingan komersial laut. Maka dari itu untuk memperoleh dominasi serupa, *rising great power* Amerika Serikat di awal abad ke-20 juga melakukan penguasaan laut (*command of the sea*) agar mampu mengeksploitasi potensi laut secara maksimal. Mahan (1898) menegaskan penguasaan laut tidak selalu diartikan sebagai penaklukan wilayah, melainkan secara damai mengontrol laut dengan membangun infrastruktur di kawasan laut strategis bersama dengan negara-negara koloni. Kawasan laut strategis berperan penting sebagai *shelter* aktivitas perdagangan laut sekaligus proyeksi militer mengantisipasi ancaman pertahanan dan keamanan laut yang berasal dari *great power* lainnya.

Laut menyediakan jalan bagi negara mencapai supremasi global. Pemahaman ini dapat terefleksikan dari pengalaman hegemoni Inggris, Belanda, Portugal, dan Spanyol yang mampu menciptakan dominasi melalui eksploitasi keuntungan strategis laut di tengah realitas keterbatasan wilayah daratan. Dalam konteks *great power*, Geoffrey Till (2009) menegaskan laut tidak hanya esensial

mendukung besarnya kepentingan *soft security* seperti menyuplai sumber daya, menyediakan jalur transportasi serta transfer informasi. Akan tetapi arti strategis laut juga terletak pada ranah *hard security* dalam upaya meningkatkan, mempertahankan, bahkan menyerang kekuatan politik negara lain. Sebagai sumber daya, laut menyediakan cadangan energi minyak dan gas guna mendukung perkembangan ekonomi dan eksistensi industri pertahanan negara besar. Laut juga bertindak sebagai *fishing ground* bagi tingginya kebutuhan konsumsi populasi sekaligus pengembangan industri kelautan. Selanjutnya, laut berperan sebagai *trade routes* bagi masifnya kepentingan ekonomi dan perdagangan *great power* di era *global free trade*. Maka dari itu proteksi *freedom of navigation* terhadap kawasan laut strategis menjadi *core interest* dikalangan *great power*. Berdasarkan sejarah panjang hubungan antar negara besar, laut juga bertindak sebagai media penyebaran informasi dan ide dikalangan negara lawan dan koloni selaras dengan kian intensifnya aktivitas *free trade* (Till, 2009). Dengan meningkatnya fungsi dan peran laut pada ketiga ranah tersebut, laut adalah sarana *great power* mencapai dan mempertahankan dominasi. Potensi strategis wilayah maritim berkontribusi besar meningkatkan kekuatan politik *great power* secara relatif atas negara lainnya (Till, 2009).

I.5.3 Konsep Maritime Anchor Tiongkok

Konsep *anchor* atau pilar maritim yang diajukan peneliti mengacu pada pemahaman strategis tentang sistem pertahanan maritim Amerika Serikat di Asia-Pasifik. Dalam tulisan William Tow (1999), sistem ini disebut *San Fransisco System* yang terbagi atas dua basis yaitu *Northern Rim* merujuk pada aliansi pertahanan maritim Amerika Serikat bersama *Northern Eastern Power* yakni Jepang dan Korea Selatan. Fokus pertahanan di bagian utara berlandaskan pada adanya *mutual threat perception* utamanya mengenai ancaman Uni Soviet dan Tiongkok pasca Perang Dunia Kedua. Sementara itu *Southern Rim* merujuk pada aliansi pertahanan Amerika Serikat bersama Australia dan New Zealand dalam bentuk Pakta ANZUS. Skema pertahanan bagian selatan meliputi kerjasama pertahanan Amerika Serikat dengan Negara-negara Asia Tenggara seperti Filipina, Thailand, dan Singapura (Tow, 1999). Pemahaman *maritime anchor* Tiongkok juga berakar pada konsep *three-island chains* oleh John Foster Dulles yang merujuk pada strategi Amerika Serikat dalam membendung aspirasi kemaritiman Uni Soviet dan Tiongkok sejak era 1950-an. Wilayah Laut Pasifik dapat dibagi dalam tiga *layer* yakni, pertama adalah kawasan *near-seas* Tiongkok hingga pesisir Asia Tenggara. *Layer* kedua meliputi laut bagian barat Jepang hingga

wilayah Kepulauan Micronesia. Sementara lapisan ketiga meliputi Kepulauan Melanesia, Polinesia hingga Hawai (Vorn Dick, 2016).

Pemahaman maritim strategis tersebut kemudian diadopsi oleh Tiongkok dalam mengembangkan sektor kemaritimannya sejak era Deng Xiaoping. Erickson dan Wuthlow (2016) memaparkan konsep *island-chains* dalam pemikiran strategis maritim Tiongkok pertama kali dikemukakan oleh Admiral Liu Huaqing mengenai pentingnya People's Liberation Army Navy (PLAN) dalam memperluas jangkauan maritimnya guna mengakomodasi ambisi reformasi ekonomi. Bagi Tiongkok, *island-chains* meliputi wilayah laut yang penting bagi kebebasan aktivitas maritim, sebagai lompatan bagi ambisi kontrol wilayah laut, serta *benchmark* bagi perkembangan proyeksi kekuatan maritim Tiongkok. Terdapat berbagai versi mengenai batasan pada setiap tingkatan wilayah, namun berdasarkan dokumen PLA dan pemahaman geostrategis yang berkembang, Erickson dan Wuthlow (2016) memaparkan penguasaan seluruh wilayah di Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan merupakan bagian dari *first-island chain*. Secara umum *second-island chain* bagi Cina mencakup wilayah dari Laut Mariana hingga mencapai kepulauan Mikronesia di Pasifik Selatan. Sementara walaupun tidak dipaparkan secara eksplisit dalam kerangka kebijakan strategisnya, menurut Erickson dan Wuthlow (2016) ambisi *maritime sphere of influence* Tiongkok telah mencapai tingkatan ketiga memasuki seluruh wilayah Oceania hingga mencapai kepulauan Hawai. Tulisan Vorn Dick (2016) kemudian menambahkan pemahaman konsep *island chain* Tiongkok. Menurut pemahamannya, orientasi kemaritiman Tiongkok saat ini telah mencakup seluruh wilayah laut Indo-Pasifik. Dalam hal ini *layer* maritim Tiongkok keempat adalah Laut Hindia di Kawasan Asia Selatan ditandai keberadaan pelabuhan Tiongkok di Hambantota dan Gwadar. Sementara laut bagian Timur Afrika menjadi lapisan maritim Tiongkok kelima melalui keberadaan naval base-nya di Djibouti.

Bagan 1.4
First dan Second Island Chain

Sources	First Island Chain	Second Island Chain
Sr. Col. Feng Liang, Lt. Col. Duan Tingzhi (<i>China Military Science</i>)	Japanese archipelago, Ryukyu Islands, Philippine Islands	Volcano Islands, Northern Mariana Islands
Maj. Gen. Zhang Shiping (<i>China's Sea Power</i>)	Yellow Sea, East China Sea, Ryukyu Islands, South China Sea, Philippine Islands	Kuril Islands, Hokkaido, Nanpo Islands, Northern Mariana Islands, Caroline Islands, New Guinea Islands
Adm. Liu Huaqing (<i>Memoirs</i>)	Japan, South Korea, Taiwan, Philippine Islands, Greater Sunda Islands	Bonin and Mariana Islands, Guam, Palau Islands
<i>PLAN Handbook</i>	Japanese archipelago, Ryukyu Islands, Taiwan, Philippine Islands	Southern islands (including the Ogasawara archipelago, Volcano Islands), Northern Mariana Islands, Guam, Palau Islands, Yap Islands

Sumber : Erickson dan Wuthlow, 2016. China Conceptualize the Pacific Island Chains

Pemahaman tentang adanya pilar maritim Tiongkok di kawasan Pasifik juga disampaikan oleh Mark Lanteigne (2012) yang membagi ke dalam dua *layer* yaitu *Western Pacific* dan *Southern-Pacific*. *Western Pacific* merupakan wilayah *near seas* Tiongkok meliputi Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan. Fokus maritim Tiongkok kini mencapai kawasan *Southern Pacific* sebagai *layer* kedua mencakup wilayah laut Kepulauan Pasifik Selatan. Walaupun terletak jauh dari daratan Tiongkok, namun kawasan laut ini berperan sebagai *far-seas area* penunjang proyeksi kemaritimannya. Akan tetapi berbeda dengan implementasi *hard-balancing* dengan memproyeksikan kekuatan *navy* secara agresif di Pasifik Barat, pengembangan kekuatan maritim Tiongkok di *layer* kedua menekankan pada strategi *soft-balancing* melalui penekanan diplomasi dan kerjasama dengan negara-negara kawasan.

Gambar 1.3
Lima Maritime Island Chain Tiongkok



Sumber : Vorn Dick, 2018. China's Reach Has Grown, Should Island Chain

I.6 Argumentasi Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang diajukan, penelitian ini berargumentasi bahwa Pasifik Selatan memiliki arti penting sebagai *southern anchor* atau pilar bagian selatan bagi proyeksi kekuatan maritim global Tiongkok Era Xi Jinping.

I.7 Ruang Lingkup Penelitian

Guna menganalisis signifikansi maritim Pasifik Selatan sebagai *southern anchor*, penelitian ini mencakup pembahasan mengenai evolusi kekuatan maritim Tiongkok sejak era pasca Perang Dingin hingga pengembangan di era Xi Jinping. Dengan demikian penelusuran empiris dilakukan meliputi periode pemerintahan era sebelum Xi Jinping 1990-2013 dan pada masa Pemerintahan Xi Jinping, dibatasi tahun 2013-2020.

I.8 Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang bertujuan menganalisis fenomena meningkatnya kehadiran Tiongkok di Pasifik Selatan berdasarkan kerangka teori mengenai signifikansi peran kawasan maritim bagi negara.

I.9 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui proses studi literatur. Proses ini dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder melalui analisis konten terhadap beberapa buku, jurnal, berita, dan melalui tulisan dari penstudi lainnya.

I.10 Sistematika Pembahasan

Pada bagian Bab II penelitian ini membahas evolusi kemaritiman Tiongkok pasca Perang Dingin. Selanjutnya Bab III berisikan penjelasan proyeksi kekuatan maritim global Tiongkok Xi Jinping. Sementara Bab IV berfokus pada penguatan relasi dan pengembangan maritim Xi Jinping di Pasifik Selatan. Bab V menganalisis arti penting Pasifik Selatan sebagai *southern maritime anchor* bagi Tiongkok. Sebagai penutup Bab VI merupakan kesimpulan penelitian dan poin-poin baru untuk penelitian lebih lanjut.